

## MENCARI MODEL POLITIK DARI DALAM GEREJA

RUDIYANTO

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta  
publicatheologia21@gmail.com

DOI: 10.21460/aradha.2023.33.973

### Abstract

---

The Church finds herself in the midst of society. She has to proclaim the good news entrusted to her to the poor. In doing so she must be aware of the existence of the Powers and Principalities, structural entities influencing human lives. Among these Powers is the State. In this paper I try to sketch the relationship between Christ and the Church in one side and the Powers in other side, especially the State. Based on this relationship, I will offer the models which the Church may use in her participation in politics in order to proclaim the good news.

*Keywords:* powers, the church, civil society, political society.

### Abstrak

---

Gereja berada di tengah-tengah masyarakat. Ia harusewartakan kabar baik yang dipercayakan kepadanya kepada kaum miskin. Dalam melakukan hal itu, ia harus menyadari keberadaan Kuasa dan Penguasa, entitas-entitas struktural yang memengaruhi kehidupan manusia. Di antara Kuasa-kuasa tersebut adalah Negara. Dalam tulisan ini saya mencoba membuat sketsa hubungan antara Kristus dan Gereja di satu sisi dengan Penguasa di sisi lain, khususnya Negara. Berdasarkan relasi ini, saya akan menawarkan model-model yang dapat digunakan oleh Gereja dalam partisipasinya di bidang politik untukewartakan kabar baik.

*Kata-kata kunci:* kuasa-kuasa, gereja, masyarakat sipil, masyarakat politik.

---

## Pendahuluan

Gereja ada di tengah masyarakat. Bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, Gereja juga “berhadap-hadapan” dengan Negara. Dalam pada itu, Gereja mengemban amanat Junjungannya, Yesus Kristus, untuk menjadi saksi, yakni mewartakan Kabar Gembira kepada umat manusia, *wabil chusus* mereka yang miskin (=terhisap, tertindas, dan terpinggirkan). Padahal (1) kaum miskin ada dalam masyarakat; dan (2) kebijakan-kebijakan Negara sangat berdampak terhadap kaum miskin. Kenyataan ini membuat Gereja (-gereja) tidak lepas dari politik. Pertanyaannya, politik macam manakah yang hendaknya dijalankan Gereja? Adakah model politik bagi Gereja?

---

## Kuasa-kuasa

Dalam *Corpus Paulinum* kita mengenali keberadaan struktur-struktur atau jejaring struktural yang mempengaruhi kehidupan manusia. *Corpus Paulinum* menyebutnya dengan berbagai istilah.<sup>1</sup> Untuk memudahkan, kita akan menggunakan salah satu dari istilah-istilah tersebut, yakni Kuasa-kuasa (*exousiai*). Kita membaca dalam *Corpus Paulinum* bahwa Kuasa-kuasa diberi tempat dan peran dalam penyelenggaraan ilahi (Kolose 1:15-17), mendaku kedudukan yang ilahi atas segenap ciptaan bahkan menuntut kepatuhan mutlak dari manusia (Galatia 4:8; 1Korintus 2:6; Efesus 2:1; 6:12), dan melalui Salib Kristus telah dikalahkan (Kolose 2:13-15) sekaligus diperdamaikan Allah dengan diri-Nya (Kolose 1:20) (lih. Berkhof, 1962: 21-37).

Sekalipun “nasib” mereka telah ditentukan, Kuasa-kuasa masih berusaha mempertahankan cengkeraman mereka atas umat manusia. Mereka masih bekerja di kalangan kaum pendurhaka (Efesus 2:2). Bahkan, melalui “darah dan daging,” mereka berperang melawan kaum beriman (Efesus 6:11). Kaum beriman diminta untuk cermat, bahwa di balik “darah dan daging” (=manusia yang memerangi mereka), terdapat siasat Iblis (*he methodeia tou diabolou*, ay. 11). Mencermati hal itu, kaum beriman menyadari bahwa mereka sedang bergulat dengan Kuasa-kuasa (ay. 12) atau struktur-struktur yang memecahbelah umat manusia dan mengasingkan manusia dari Allah (bdk. Efesus 1:14-16; 2:2, 12). Karena itu, untuk melawan Kuasa-kuasa kaum beriman harus menggunakan “seluruh perlengkapan senjata Allah” (*he panoplian tou theou*, Efesus 6:11), yang tak lain dari mengamalkan kebenaran dan keadilan, mewartakan Injil Perdamaian, mengaktifkan iman, keselamatan, dan firman Allah, serta bertekun dalam doa dan permohonan (ay. 13-18a).

Menurut Surat Kolose, sekalipun Kuasa-kuasa, melalui Salib Kristus, telah dilucuti dan diperdamaikan dengan Allah, sejumlah kaum beriman masih membiarkan diri mereka

didikte oleh Kuasa-kuasa, *wabil chusus* oleh aspek ritualnya. Mereka masih membiarkan orang menghukum mereka “mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau pun hari Sabat (Kolose 2:16).” Padahal itu semua hanya merupakan “bayangan dari apa yang harus datang”; sedangkan “yang harus datang” atau wujud sejati dari bayangan itu adalah Kristus (ay. 17). Mereka juga masih menaklukkan diri pada “rupa-rupa peraturan...: jangan jamah ini, jangan sentuh ini...” (ay. 21). Padahal itu semua “hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia” (ay. 22).

Dalam Surat Galatia, Kuasa-kuasa dipandang memiliki peran sebagai penuntun(*paedagogos*) sampai Kristus datang untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham: “Olehmu segala bangsa akan diberkati” (Galatia 3:8). Itu berarti, semua orang berdosa berada di bawah perwalian dan pengawasan Kuasa-kuasa atau “unsur-unsur dunia” (*ta stoikheia tou kosmou*, TB-LAI: roh-roh dunia, Galatia 4:3) hingga “genap waktunya,” manakala Allah mengutus Anak-Nya (ay. 4). Untuk sementara waktu, mereka takluk kepada Kuasa-kuasa.

Setelah Kristus atau Iman itu datang, mereka dibebaskan dari “pengawasan penuntun” atau Kuasa-kuasa (Galatia 3:25) dan menjadi anak-anak Allah (ay. 26). Kristus telah memerdekakan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh merdeka dari Kuasa-kuasa (Galatia 5:1). Hukum Taurat termasuk di antara Kuasa-kuasa itu (lihat Galatia 3:3-4). Demikian juga sistem-sistem sosial yang membelah masyarakat ke dalam kelas-kelas dan memisahkan manusia melalui diskriminasi rasial dan ketidakadilan gender.

Kuasa-kuasa tersebut, termasuk Hukum Taurat, sebenarnya “lemah dan miskin” (ay. 9). Mereka tidak layak diilahirkan. Dalam tata reksa ilahi, mereka memiliki peran positif, yakni mengekang manusia dari agar tidak terjerumus ke dalam *total depravity* dan kekacauan sosial. Setelah Kristus datang, peran mereka selesai. Kaum beriman harus berfokus kepada Kristus. Ironisnya masih ada orang, termasuk dari kalangan beriman, yang menganggap mereka sebagai Allah (ay. 8).

---

## Negara

Dalam *Corpus Paulinum*, “Pemerintah” (yang di zaman kuno identik dengan Negara) terbilang di antara Kuasa-kuasa. Roma 13:1 menyebutnya *exousiai hyperexousiai* (=kuasa-kuasa yang memerintah; TB-LAI: “pemerintah yang ada di atasnya”). Tidak ada kuasa-kuasa jika tidak dari Allah; dan (kuasa-kuasa) yang ada sekarang telah ditetapkan oleh Allah (*hai ousai hupo theou tetagmenai eisin*; TB-LAI: dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah).

Menurut Roma 13:4a, “kuasa yang memerintah” adalah “pelayan Allah demi kebaikan bagimu” (*theou diakonos estin soi to agathon*; TB-LAI: “hamba Allah untuk kebaikanmu”). Adapun yang dimaksud dengan “kebaikan bagimu” terkait dengan seruan agar kaum beriman tidak menuntut balas (*mê heautous ekdikountes*, Roma 12:19) atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Dengan tidak menuntut balas, kaum beriman memberi tempat kepada murka Allah. Sebab, menyitir Ulangan 32:35, pembalasan adalah hak Allah. Dialah yang akan menuntut balas atas kejahatan yang dilakukan terhadap kaum beriman. Rupanya, pembalasan itu akan dilakukan oleh “kuasa yang memerintah” alias Pemerintah/Negara. Menurut Roma 13:4b, “kuasa yang memerintah” adalah “pelayan Allah, yang membalaskan murka kepada mereka yang melakukan kejahatan” (*theou diakonos estin, ekdikos eis orgên tô to kakon prassonti*; TB-LAI: “hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat”).

“Kuasa yang memerintah” menjalankan peran sebagai pelayan Allah dengan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Untuk itu ia “menyandang pedang” (*ten makhairan phorei*, Roma 13:4a). Kaum beriman tidak dikecualikan dari pembalasan murka Allah melalui pedang “kuasa yang memerintah” bila mereka melakukan kejahatan. Oleh karena itu kaum beriman patut takut kepada “kuasa yang memerintah” bila mereka melakukan kejahatan. Akan tetapi, bila kaum beriman, bahkan tiap-tiap orang, melakukan perbuatan yang baik, mereka tidak perlu takut kepada “kuasa itu” (*he exousia*, Roma 13:3b). Mereka justru akan beroleh pujian (*epainos*) daripadanya. Sebab para penguasa (*hoi arkhontes*; TB-LAI: pemerintah) bukan merupakan teror bagi perbuatan yang baik, melainkan teror bagi perbuatan yang jahat (*ouk eisin phobos tô agathô ergô alla tô kakô*, Roma 13:3a; TB-LAI: “Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat”). Demikianlah, Pemerintah/Negara telah ditetapkan Allah sebagai pelayan-Nya dalam rangka membalaskan murka Allah kepada para pelaku kejahatan dan memuji para pelaku kebaikan. Dalam konteks ini, “barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya” (Roma 13:2).

Dalam arti apakah Pemerintah/Negara atau Kuasa-kuasa yang ada “ditetapkan oleh Allah” (*hupo theou tetagmenai eisin*, Roma 13:1)? J.H. Yoder mengemukakan bahwa bagi Protestantisme, baik Lutheran maupun Calvinis, “ditetapkan oleh Allah” memiliki konotasi yang positif. Allah memang menghendaki keberadaan pemerintah. Negara memiliki sifat sakral karena didasarkan pada ketetapan Allah. Dalam ketetapan kudus-Nya Allah menahbiskan (*ordain*) kuasa-kuasa. Bagi Lutheranisme, ini mencakup Negara/Pemerintah mana pun yang ada. Baik atau jahat, orang Kristen harus menerima keberadaan pemerintah tersebut sebagai kehendak Allah (Yoder, 2002: 199). Yoder menyebutnya pandangan positivistik (Yoder, 2002: 199).

Bagi Calvinisme, ini merujuk pada otoritas yang diemban oleh Negara/Pemerintah. Memang ada Negara/Pemerintah yang baik, ada juga Negara/Pemerintah yang jahat. Negara/Pemerintah yang baik mempromosikan *bonum commune generale*. Orang Kristen wajib menaati Negara/Pemerintah yang baik. Negara/Pemerintah yang jahat melalaikan *bonum commune generale* dan memusuhi orang Kristen. Sudah barang tentu, orang Kristen tidak boleh menaati Negara/Pemerintah yang jahat. Lebih jauh, sebagai warganegara orang Kristen wajib melawan: melancarkan pemberontakan terhadap Negara/Pemerintah yang demikian (Yoder, 2002: 199-200). Yoder menyebutnya pandangan normatif (Yoder, 2002: 199).

Kita perlu memberi sedikit catatan. Gambaran yang diberikan Yoder tentang pandangan Calvinis atau pandangan normatif tentang Negara/Pemerintah tidak membedakan antara posisi Calvin sendiri dan posisi para pengikutnya. Calvin sendiri membedakan antara rakyat dan orang-orang yang berkedudukan sebagai pejabat-pejabat rakyat. Baginya rakyat tidak boleh melawan raja (=penguasa) yang zalim. Dalam *Institutio*, Calvin mengemukakan:

Tetapi apapun yang dapat dipikirkan tentang tindakan-tindakan orang-orang itu sendiri, Tuhan melakukan pekerjaan-Nya melalui mereka, ketika Ia meremukkan tongkat-tongkat kerajaan yang berlumuran darah dari raja-raja yang zalim, dan menggulingkan kekuasaan mereka yang tak tertahankan. Hendaklah para penguasa mendengar dan menjadi takut; tetapi pada saat yang sama marilah kita berjaga-jaga dengan waspada dari menolak dan melanggar otoritas yang mulia dan agung dari para penguasa, sebuah otoritas yang telah disetujui Allah dengan ketetapan yang paling pasti, kendati mereka yang telah dinobatkan itu sama sekali tidak layak dan ... mencemarkannya dengan kejahatan mereka. Kendati Tuhan menuntut balas terhadap kekuasaan yang tak terkendali, janganlah kita menganggap bahwa pembalasan itu diserahkan kepada kita, yang tidak pernah menerima perintah apapun kecuali untuk taat dan menderita (Calvin, t.t.: Book IV, Chapter 20:31).

Tugas untuk melawan raja (=penguasa) yang zalim ada pada para pejabat rakyat. Lagi kata Calvin:

Saya berbicara hanya tentang rakyat. Sebab para pejabat rakyat telah diangkat untuk mengekang tirani para raja.... Saya sama sekali tidak melarang mereka untuk secara resmi menghentikan kekuasaan raja-raja yang tidak pada tempatnya. Jika mereka berkomplot dengan raja-raja ketika mereka bersimaharajalela dan menista yang paling rendah di antara rakyat, saya menegaskan bahwa kepura-puraan mereka tidak bebas dari tipu daya yang keji, karena mereka dengan curang telah mengkhianati kebebasan rakyat, padahal mengetahui bahwa oleh ketetapan Allah mereka telah diangkat menjadi penjaga-penjaganya (Calvin, t.t.: Book IV, Chapter 20:31).

Henry M. Meeter, seorang Calvinis, membahasakan pendirian Calvin tersebut dengan indah:

Metode melakukan perlawanan dan pembelaan atas kebebasan rakyat adalah melalui perlawanan konstitusional melalui perwakilan-perwakilan yang sah... Di manapun perlawanan terhadap otokrasi melalui para perwakilan yang sah itu tidak dimungkinkan, Calvin menganjurkan sikap tunduk alih-alih pemberontakan rakyat (Meeter, 1990: 119-20).

Pendirian para pengikut Calvin berbeda. Dalam kajian Douglas F. Kelly, yang juga seorang Calvinis,

Di Skotlandia, John Knox mengikuti Calvin di dalam berpegang kepada suatu konsep yang secara esensial berasal dari abad pertengahan dan Katolik mengenai pemerintahan sipil Kristen yang melindungi dan mendukung gereja yang umumnya bersifat independen. Tetapi Knox berbeda dengan Calvin dalam berpegang kepada suatu pandangan yang lebih radikal mengenai perlawanan sipil. Knox, tidak seperti Calvin, secara aktual mengajarkan hak dan kewajiban rakyat biasa untuk melakukan revolusi melawan otoritas yang memerintah, bahkan tanpa dipimpin oleh pejabat pemerintahan yang lebih rendah sekalipun, jika otoritas-otoritas sekuler itu menolak untuk menyingkirkan penyembahan berhala dan mendirikan agama Reformed. Knox, berbuat lebih dari Calvin dalam mengembangkan secara lebih menyeluruh, dengan mendasarkannya kepada preseden-preseden dalam Alkitab, terutama teokrasi bangsa Yahudi dalam Perjanjian Lama, sebagai dasar bagi pembentukan—dan penggulingan—institusi-institusi hukum kontemporer (Kelly, 2001: 192-3).

J.H. Yoder menempatkan diri pada posisi ketiga, di luar pandangan positivistik dan pandangan noramtif. Menurut Yoder, kata *tassein* (=kata dasar bagi *tetagenai*) tidak berarti menahbiskan (*to ordain*), tetapi mengatur atau memerintahkan (*to order*) (Yoder, 2002: 201). Menurut Yoder, Allah tidak menahbiskan Negara/Pemerintah di antara manusia. Ia menandakan:

Seakan-akan pernah ada suatu masa ketika tidak ada pemerintah, lalu Allah membuat pemerintah melalui sebuah intervensi penciptaan yang baru; telah ada hierarki dan otoritas dan kuasa sejak masyarakat manusia ada. Penggunaannya selalu melibatkan dominasi, rasa tidak hormat kepada harkat dan martabat manusia, dan kekerasan yang riil atau potensial sejak dosa ada (Yoder, 2002: 201).

Kendati demikian, menurut Yoder, Allah memberi tempat dan peran kepada Negara/Pemerintah di dalam tata reksa-Nya. Artinya, Allah menggunakan Negara/Pemerintah sebagai salah satu alat tata reksa-Nya. Baik atau jahat, Negara/Pemerintah dipakai Allah, bahkan kendati Allah tidak menyetujui kejahatan-kejahatan yang dilakukan Negara/Pemerintah. Sebagai contoh, Allah memakai Asyur untuk menghajar Israel, sekaligus tidak menyetujui kebrutalan negara adidaya itu terhadap Israel (Yoder, 2002: 201).

Atas dasar itu, menurut Yoder, kaum beriman tunduk (*hupotassein*) kepada Negara/Pemerintah. Tunduk, pertama berarti mengakui kedudukan dan peran negara dalam tata reksa ilahi; dan kedua berarti tidak melawan dalam arti melakukan pemberontakan kepada negara ketika negara melakukan apa yang jahat, termasuk menganiaya orang kaum beriman. Kendati demikian orang Kristen tidak melibatkan diri dalam “fungsi kekerasan” yang dijalankan Negara/Pemerintah, yakni menuntut balas kepada orang yang berbuat jahat. Sebab orang Kristen dipanggil bukan untuk membalaskan murka Allah, melainkan untuk “mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.” Menurut Yoder, dalam Roma 13:1-7, “Fungsi-

fungsi yang secara aktual diminta pemerintah kepada warganegaranya tidak mencakup partisipasi dalam menyandang pedang pemerintah” (Yoder, 2002: 203).

Di samping itu kaum beriman harus menaati Negara/Pemerintah sejauh Negara/Pemerintah tidak menuntut mereka untuk mengingkari keyakinan mereka. Namun, bila toh orang Kristen tidak menaati Negara/Pemerintah, mereka tidak akan melawan dalam artian memberontak kepada negara. Bila alat tata reksa Allah yang berfungsi membalaskan murka Allah kepada orang yang berbuat jahat itu justru menganiaya orang Kristen, mereka dipanggil untuk memikul penderitaan itu sekaligus tidak mengkompromikan keyakinan mereka. Tunduk, tapi tidak patuh buta; tidak patuh tapi tidak menentang (=melakukan perlawanan aktif terhadap) negara. Tidak ada kata pemberontakan dalam kamus kaum beriman. Ia bersedia menderita. Dengan jalan itu kaum beriman meneladani Kristus. Bagi Yoder, kesediaan untuk menderita adalah “partisipasi dalam karakter dari kesabaran yang jaya pada Allah atas kuasa-kuasa ciptaan yang memberontak” (Yoder, 2002: 209).

Dari ketiga pandangan teologis tentang Negara, penulis melihat bahwa pandangan Yoderian dapat menjadi dasar bagi penulis untuk melihat Negara bukan sebagai sesuatu yang sakral. Baik keberadaan Negara maupun Otoritas Negara tidak bersumber dari Allah. Negara, yang timbul dari dinamika sosial umat manusia, sekadar diberi-Nya tempat dalam tata reksa ilahi. Allah yang tidak menghendaki umat manusia terjermus ke dalam *chaos* karena *homo homini lupus* dan *bellum omnium contra omnes*, memakai Negara untuk menegakkan dan memelihara kehidupan bersama yang relatif aman, tertib, dan damai. Jauh dari sakral, Negara hanyalah sebuah alat di tangan Allah.

Dalam pada itu, sangatlah menarik untuk memperhatikan bahwa Yoder mengasumsikan “telah ada hierarki dan otoritas dan kuasa sejak masyarakat manusia ada. Penggunaannya telah melibatkan dominasi, ketidakhormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan kekerasan yang riil atau potensial sejak dosa ada.” Pernyataan ini menggabungkan pandangan sosiologis dan teologis: “telah ada hierarki dan otoritas dan kuasa sejak masyarakat manusia ada” dan “Penggunaannya telah melibatkan dominasi... sejak dosa ada.”

Yoder tidak menjabarkan lebih lanjut klausa “sejak dosa ada,” semisal dengan merujuk pada “kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa” sehingga “oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa” (Roma 5:19). Ia sekadar mengasumsikan bahwa *abuse* atas “hierarki dan otoritas dan kuasa,” yang melibatkan “dominasi, ketidakhormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan kekerasan yang riil atau potensial” terjadi sejak dosa ada. Negara, yang bercirikan hierarki dan otoritas dan kuasa, bila baru muncul sejak dosa ada, secara tak terelakkan akan terlibat dalam semua keburukan itu.

Menurut perspektif Materialisme Historis, dalam sebagian terbesar sejarahnya manusia tidak mengenal Negara. Selama puluhan ribu tahun Masyarakat-masyarakat Suku,

yakni masyarakat-masyarakat yang belum terbelah ke dalam kelas-kelas antagonistis (=kelas penghisap dan kelas terhisap), hidup tanpa negara. Masyarakat-masyarakat itu hidup dari berburu dan meramu. Proses produksi tersebut dikerjakan secara kolektif. Hasilnya, yang hanya cukup untuk menyambung hidup secara kolektif pula. Belum ada surplus produksi. Ketika Masyarakat-masyarakat Suku mulai mengenal pertanian (Mendel, 1977: 20) dan lambat-laun beralih kepada proses produksi tersebut, mereka menghasilkan surplus produksi. Surplus produksi memungkinkan segelintir orang untuk hidup (bahkan memperkaya diri) dari jerih-payah sebagian besar orang lainnya. Segelintir orang itu menjadi kelas penghisap, sementara sebagian besar lainnya menjadi kelas terhisap. Masyarakat terbelah ke dalam kelas-kelas antagonistis (lih. Mendel, 1977: 19).<sup>2</sup> Untuk membakukan dan mempertahankan penghisapan itu, kelas penghisap mengorganisasikan kekuasaannya. Maka lahirlah negara. Bila “sejak dosa ada” berarti “sejak terbelahnya masyarakat ke dalam kelas-kelas antagonistis,” maka negara lahir “sejak dosa ada.”

Saya tidak sependapat dengan Yoder dalam pandangannya bahwa kaum beriman harus tunduk dalam arti tidak melakukan perlawanan aktif kepada Negara/Pemerintah. Bahwa kaum beriman harus mengakui tempat Negara/Pemerintah dalam tata reksa ilahi, saya sepakat. Bahwa kaum beriman harus menghormati Negara/Pemerintah dalam bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam tata reksa ilahi, saya sepakat. Demikian juga bahwa kaum beriman harus mematuhi Negara/Pemerintah sejauh tuntutan mereka tidak bertentangan dengan kepatuhan kaum beriman kepada Allah, dan sebaliknya tidak boleh menaati tuntutan yang bertentangan dengan ketataan mereka kepada Allah.

Akan tetapi menurut pendapat saya, demi ketaatan kepada Allah dan solidaritas kepada kaum miskin (=yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan), kaum beriman terpanggil untuk membantu Negara/Pemerintah agar sungguh-sungguh berfungsi sebagai pelayan Allah dalam tata reksa-Nya. Implikasinya, tidak diharamkan bagi kaum beriman untuk terlibat dalam upaya memperbaiki sistem Negara/Pemerintah (pendekatan reformis), bahkan upaya mengganti sistemnya secara keseluruhan (pendekatan revolusioner). Pendekatan reformis bertujuan membuat Negara/Pemerintah, sebagai pengorganisasian kekuasaan kelas penghisap, lebih mengakomodir kepentingan kaum miskin. Pendekatan revolusioner bertujuan *membangun kembali* Negara/Pemerintah sebagai struktur yang berfungsi sebagai alat untuk mendemokratisasikan kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi reformis dan revolusioner ini, menurut hemat saya, sejalan dengan keyakinan bahwa Kuasa-kuasa bukan saja telah dikalahkan tetapi juga ditebus atau diperdamaikan dengan Allah sehingga dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

---

**Gereja**

*Corpus Paulinum* juga berkata-kata tentang Gereja sebagai “satu umat manusia yang baru” (Efesus 2:15; bdk. 4:24); Tubuh Kristus (tanda-kehadiran Kristus di dalam dunia, Efesus 1:23; bdk. 4:4, 12, 16; 5:23, 30; Kolose 1:18, 24; 2:19; 3:15), bahkan koloni sorga (Filipi 3:20; bdk Efesus 2:12). Orang-orang percaya adalah anak-anak Allah, yang di dalam Kristus telah melampaui perbedaan ras, kelas, dan gender (Galatia 3:26-28; Kolose 3:11), “sesama warga orang-orang kudus” dan “anggota-anggota rumah tangga Allah” (Efesus 2:19). Rumah tangga Allah atau Tubuh Kristus itu disatupadukan (Efesus 2:21; 4:16) untuk tumbuh menjadi kenisah kudus atau tempat kediaman Allah (Efesus 2:21-22).

Berkenaan dengan Kuasa-kuasa, Allah menghendaki agar kekayaan hikmat-Nya diberitahukan kepada mereka melalui Gereja (Efesus 3:10), yang tak lain dari “Misteri Kristus,” yang tak lain dari diikutsertakannya orang-orang bukan Yahudi sebagai “ahli-ahli waris dan anggota-anggota Tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus” (ay. 6). Dengan kata lain, orang-orang bukan Yahudi terhisab dalam “satu umat manusia yang baru.” Allah menghendaki supaya melalui Gereja Kuasa-kuasa dibuat mengerti tentang berakhirnya struktur-struktur yang memecahbelah umat manusia dan merintangi persekutuan manusia dengan Allah (lihat Efesus 2:14-16). Keberadaan Gereja adalah suatu proklamasi atau pewartaan bahwa dominasi Kuasa-kuasa atas semesta dan umat manusia secara definitif telah berakhir.

Allah telah membangkitkan Kristus dan mengaruniakan kepada-Nya kedudukan yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih otoritatif daripada Kuasa-kuasa (Efesus 1:20-21). Hal ini dilakukan-Nya sebagai bagian dari “rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya dalam Kristus,” yakni “untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kepala, segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi” (ay. 10). Segala sesuatu, sudah barang tentu, mencakup Kuasa-kuasa, termasuk Negara/Pemerintah. Dengan demikian tidak saja Kuasa-kuasa berkedudukan di bawah Kristus, mereka juga terhisab dalam semesta yang diperintah oleh Kristus. Ini menjadi landasan yang kuat bagi Gereja untuk menentukan sikap terhadap Kuasa-kuasa, *wabil chusus* Negara/Pemerintah.

---

**Masyarakat Sipil**

Bila Gereja diamanati sebagai pewarta kepada Kuasa-kuasa, *wabil chusus* Pemerintah (dalam arti negara) bahwa dominasi mereka atas semesta dan umat manusia secara definitif telah berakhir, apa yang dapat, perlu, bahkan harus dilakukan Gereja? Pertama-tama agaknya kita

perlu mempertimbangkan *locus* politik Gereja. Kita lazim menyebut *locus politicus* tersebut Masyarakat Sipil.

Bagi John Locke dan J.J. Rousseau, Masyarakat Sipil merujuk pada pemerintahan sipil, yang terbentuk melalui Kontrak Sosial di antara orang-orang yang semula hidup dalam keadaan alamiah. Masyarakat Sipil adalah antitesis dari keadaan alamiah (lih. Sassoon, 2001: 82).

Bagi G.W.F. Hegel, Masyarakat Sipil adalah satu momen atau tahapan dari Idea Absolut, yang di satu sisi lebih tinggi dari Keluarga, dan di sisi lain lebih rendah dari Negara. Orang mengalami kesatuan dengan sesama anggota keluarga. Orang bergantung kepada Keluarga. Meninggalkan Keluarga, orang mendapati diri sebagai individu yang mandiri dan harus bersaing seorang dengan yang lain. Arena bagi individu-individu yang mandiri dan saling bersaing bahkan menjadikan sesamanya sebagai sarana atau alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadinya adalah Masyarakat Sipil (Hegel, 2001: 154-5). Negara, yang merupakan sintesis dari Keluarga dan Masyarakat Sipil, mengukuhkan individualitas tiap-tiap orang sekaligus membatasi persaingan dan menjamin kepentingan bersama seluruh masyarakat.

Marx, yang cenderung sejalan dengan pandangan Hegel tentang Masyarakat Sipil, memandang bahwa Masyarakat Sipil terdefiniskan seturut dengan relasi-relasi produksi Kapitalis. Masyarakat Sipil terpecah dalam kelas-kelas antagonis, dan pemilahan tersebut tercermin dalam pemilihan-pemilahan politis. Kata Marx,

*Kelas para warga biasa* tidak mentransformasikan dirinya menjadi sebuah kelas *politis*, tetapi memasuki signifikansi dan kemampuan politisnya sebagai kelas dari para warga biasa. Ia tidak begitu saja memiliki hak atas signifikansi dan kemampuan politis. Signifikansi dan kemampuan politisnya adalah *signifikansi dan kemampuan politis dari kelas para warga biasa sebagai kelas para warga biasa*. Karena itu kelas ini dapat memasuki ranah politik hanya dalam kesesuaian dengan *pemilahan-pemilihan kelas dalam masyarakat sipil*. Pemilihan-pemilihan kelas dari masyarakat sipil dengan demikian terwujud sebagai pemilahan-pemilahan politis (Marx, 1975: 136).

Sederhananya, Masyarakat Sipil terbelah di antara dua kelas antagonis: kelas borjuis, pemilik alat-alat produksi (massal) dan kelas buruh, yang sekadar memiliki kemampuan untuk bekerja. Kelas borjuis adalah kelas penghisap, kelas buruh alias proletariat adalah kelas terhisap. Masyarakat Sipil yang antagonis itu membutuhkan negara, bukan untuk menjadi wasit yang adil bagi si penghisap dan sang terhisap, melainkan untuk menjamin relasi-relasi produksi Kapitalis dan mengamankan kepentingan kelas borjuis. Negara adalah pengorganisasian kekuasaan kelas yang berdominasi dalam Masyarakat Sipil. Marx menandakan:

Berdasarkan fakta bahwa ia merupakan sebuah kelas dan bukan lagi sebuah *estate*, borjuasi harus mengorganisir dirinya bukan lagi secara lokal, tetapi secara nasional, dan untuk memberikan sebuah bentuk yang umum kepada kepentingan-kepentingan rata-ratanya. Melalui pembebasan kepemilikan pribadi dari komunitas, negara telah menjadi sebuah entitas yang terpisah, di samping dan di luar Masyarakat Sipil; tetapi ia tak lain dari bentuk pengorganisasian yang harus diadopsi borjuis, baik untuk tujuan-tujuan internal maupun tujuan-tujuan eksternal, demi jaminan bersama bagi kepemilikan dan kepentingan-kepentingan mereka (Marx, 1998: 99).

Antonio Gramsci, seorang Marxis Italia, memahami Masyarakat sebagai bagian dari negara dalam artian luas. Sebagai pengorganisasian kekuasaan kelas borjuis, negara memiliki dua tangan untuk menegakkan kekuasaan kelas borjuis atas kelas buruh dan lapisan-lapisan kelas pekerja lainnya. Kedua tangan itu adalah paksaan (melalui monopoli kekerasan yang dilegalkan) dan hegemoni (kepemimpinan moral dan intelektual kelas penguasa atas kelas dan lapisan-lapisan yang dikuasai). Tangan pertama bekerja melalui “masyarakat politik,” sedangkan tangan yang kedua bekerja melalui Masyarakat Sipil (lih. Gramsci, 1983: 12, 261). Dalam Masyarakat Sipil, yakni melalui keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, bahkan hiburan dan media massa, idea-idea kelas penguasa disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada kelas dan lapisan-lapisan yang dikuasai. Tujuannya adalah membuat kelas dan lapisan-lapisan yang dikuasai berpikir dan merasa menurut wawasan dunia dan sistem nilai kelas yang berkuasa. Dalam kata-kata John Schwarzmantel, “Negara bagi Gramsci tidak murni sebagai sebuah badan pemaksa, tetapi mencakup institusi-institusi yang berupaya menegakkan hegemoni kelompok penguasa dan persetujuan dari kelas-kelas yang terbawahkan” (Schwarzmantel, 2015: 201).

Konsepsi tentang Masyarakat Sipil ini mengingatkan kita pada pernyataan Karl Marx dalam *German Ideology*: Idea-idea dari kelas penguasa adalah idea-idea yang berkuasa dalam tiap-tiap epos (Marx, 1998: 47).

Akan tetapi, Masyarakat Sipil juga merupakan wilayah perjuangan politik. Kendati Masyarakat Sipil merupakan tangan hegemonik kelas penghisap, Masyarakat Sipil juga bisa menjadi arena “perang posisi” bagi kelas buruh terhadap kelas penghisap. Dalam perang posisi, kelas buruh berupaya membongkar sistem benteng dan pertahanan yang mendukung hegemoni borjuis dengan membangun aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi dalam Masyarakat Sipil. Kekuasaan hegemoni yang dijalankan oleh kelas borjuis melalui organisasi-organisasi dalam Masyarakat Sipil harus terus diperlemah dengan kekuatan balik dari gerakan-gerakan sosial yang berasal dari aktivitas anggota gerakan tersebut, yang bersatu di bawah kepemimpinan kelas buruh (Simon, 2004: 111-2).

Dengan kata lain, sebelum berupaya merebut kekuasaan negara, kelas buruh (atau kekuatan-kekuatan oposisional) pertama-tama harus menegakkan hegemoni mereka dalam lingkup Masyarakat Sipil (Schwarzmantel, 2015: 208). Dalam konteks ini, Masyarakat Sipil menjadi arena konter-hegemoni. Kata Gramsci,

Sebuah kelompok sosial dapat, bahkan harus sudah menjalankan kepemimpinan sebelum menaklukkan kekuasaan pemerintahan (sesungguhnya ini merupakan salah satu syarat utama untuk menaklukkan kekuasaan tersebut); ia kemudian menjadi dominan ketika ia menjalankan kekuasaan, tapi bahkan ketika ia sudah menggenggam kekuasaan tersebut dengan mantap, ia harus terus “memimpin” juga (Gramsci, 1983: 57-58).

Sudah barang tentu, Gramsci mengharapkan agar “the Modern Prince,” yakni Partai Kelas Buruh alias Partai Komunis, melakukan kerja-kerja kontra-hegemonik dan “perang posisi” guna membangun blok historis (aliansi demokratis dari kelompok-kelompok yang terhisab dalam kelas dan lapisan-lapisan tertindas dengan bertulangpunggungkan kelas buruh).

---

## Politik

Bila politik dipahami sebagai upaya untuk merebut atau mempertahankan bahkan memperbesar kekuasaan, secara normatif politik tidak cocok bagi Gereja (-gereja). Gereja (-gereja) dipanggil oleh Junjungannya, Gusti Yesus, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani. Memang sangat mungkin, karena melayani Gereja (-gereja) berkuasa atas banyak orang, tetapi kekuasaannya berupa otoritas moral dan spiritual, yang menggugah bahkan meyakinkan dan mendorong hati manusia untuk Memuliakan Allah dengan Mengangkat Manusia, terutama sekali mereka yang miskin (=terhisap, tertindas, terpinggirkan) akibat struktur-struktur yang tidak adil. Gereja (-gereja) menemukan landasan untuk hal ini dalam sosok Gusti Yesus sendiri. Sebagaimana dikatakan Rm. Mangunwijaya,

Semangat Kristiani disamakan dengan semangat perikemanusiaan, khususnya dan terutama terhadap mereka yang selama ini tidak dianggap, bahkan dipaksa hidup tanpa martabat dan kemanusiaan... Dalam Injil, kita melihat Yesus sebagai figur yang punya perhatian istimewa kepada mereka yang sakit, cacat, kusta, terbuang, dan terhina oleh masyarakat. Ketuhanan dan kemanusiaan dalam diri Yesus lalu menjadi satu perkara yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, sehingga bagi para murid Yesus tidaklah mungkin lagi pemujaan dan pemuliaan Tuhan tanpa kepedulian terhadap nasib manusia (Mangunwijaya, 1999b: 15, 16).

Dalam pada itu, pelayanannya bisa juga mengantar Gereja (-gereja) kepada penderitaan seperti yang dialami Gusti Yesus, Junjungannya. Tapi toh dalam penderitaan itu ia mengalami betapa nyata kuasa Tuhannya, yang memberinya kekuatan sekaligus kesempatan

untuk mendapati bahwa secara paradoks pelayanan dan penderitaan itu memeteraikan kesetiannya kepada Sang Junjungan sekaligus menggugah hati banyak orang tentang kasih-solidaritas, keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi. Dalam penderitaannya Gereja (-gereja) memancarkan otoritas moral dan spiritual.

Bila politik dimaknai sebagai seni mengelola kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama, dan itu berarti menghidupi kasih solidaritas kepada kaum miskin serta menegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya perdamaian, politik cocok bagi Gereja.

Dengan menggunakan pendekatan Gramscian terhadap Masyarakat Sipil, kita tahu bahwa Gereja (-gereja) merupakan bagian dari Masyarakat Sipil. Dalam Masyarakat Sipil, Gereja (-gereja) ada di tengah permainan atau pertarungan idea dan perang posisi, baik yang dilontarkan oleh piranti ideologis rezim (hegemoni) maupun oleh kelompok-kelompok aspiratif rakyat (konter-hegemoni). Tidak jarang idea-idea tersebut “berinkarnasi” dalam gerakan-gerakan massa.

Berpolitik dalam artian yang kedua, Gereja (-gereja) perlu melakukan *discernment* (penegasan rohani) terhadap idea-idea dan wacana-wacana yang *pating sliwer* di ruang publik sekaligus gerakan-gerakan yang menubuhkannya. Gereja (-gereja) perlu memeriksanya berdasarkan komitmen politiknya: (1) kesejahteraan bersama (*shalom*) sebagai tujuan; (2) pilihan mengutamakan kaum miskin; dan (3) keadilan dan kebenaran sebagai nilai.

Gereja juga perlu menganalisis dan memetakan struktur-struktur atau Kuasa-kuasa manayang bermain dalam gelanggang idea dan wacana dan pergerakan. Ada struktur politik, ada struktur ekonomi, ada struktur-struktur kebudayaan, termasuk agama-agama. Masing-masing dengan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Berdasarkan pemetaan dan analisis tersebut Gereja menentukan keberpihakannya.

Gusti Yesus menyatakan bahwa murid-murid-Nya adalah terang dunia dan garamnya bumi (Matius 5:13-16). Pasca kebangkitan-Nya Ia juga memberi amanat kepada mereka untuk memuridkan segala bangsa. Mempertemukan gagasan *Corpus Paulinum* tentang Gereja dengan pernyataan dan amanat Gusti Yesus mungkin akan menginspirasi kita untuk mengkonstruksi model politik Gereja (-gereja).

---

## Terang, Kota di Atas Bukit

Terang memungkinkan penglihatan. Kota di atas bukit dapat dilihat bahkan dari kejauhan. Bila kita hubungkan dengan pandangan *Corpus Paulinum* tentang Gereja, kita dapat mengatakan bahwa umat manusia yang baru, yang eskatologis itu hendaknya dapat dilihat dan dijadikan rujukan oleh masyarakat, baik dalam kemerdekaannya terhadap struktur-struktur yang

menghisap, menindas, dan meminggirkan, maupun dalam kepeloporannya dalam menghidupi *counter culture* alias budaya alternatif/tandingan.

Bila Rasul Paulus berkata-kata misalnya tentang anak-anak Allah yang melampaui perjuangan kelas, rasisme, dan ketidakadilan gender (Galatia 3:26-28), maka Gereja harus berupaya dengan konsekuen menjadi komunitas yang sejahtera, yang di dalamnya orang-orang merasakan “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” (atau dalam istilah Mas Marco Kartodikromo: Sama rata, sama rasa), merayakan perbedaan ras dalam kesetaraan sebagai kekayaan rahmat, dan meredefinisikan gender (konstruksi sosial tentang peran masing-masing jenis kelamin) secara adil-partisipatoris.

Tentu ini bukan soal pamer kebaikan, melainkan tentang pembentukan dan cara berada Gereja yang berkarakter sebagai umat manusia yang baru.

---

### **Garam, Manjing Ajur Ajer**

Sifat garam, tentu, asin. Ketika lebur dengan masakan, keasinannya dirasakan. Dalam keleburrannya garam juga berfungsi antiseptik. Bila dihubungkan dengan Gereja sebagai umat manusia yang baru, garamnya bumi menyangkut “kerja-kerja tak terlihat namun terasa dan/atau ampuh” dari orang-orang beriman. Para pengikut Gusti Yesus “keluar” dari Kota di atas bukit, berkecimpung dalam Masyarakat Sipil, baik gerakan-gerakan sosial maupun gerakan politik, baik melalui media massa maupun media sosial. Meminjam ungkapan Rm. Mangunwijaya, *manjing ajur-ajer* sebagai garam (Mangunwijaya, 1999a: 101), mereka tidak membawa nama Gereja atau Kekristenan, tetapi menjalankan “politik Kristen,” yang berjiwasemangatkan memuliakan Allah dengan mengangkat sesama, khususnya mereka yang miskin.

---

### **Murid**

Dalam Matius 28:18-20, Gusti Yesus mengamanati para murid atau pengikut-pengikut-Nya untuk memuridkan segala bangsa. “Muridkanlah segala bangsa bagi-Ku.” Biasanya, memuridkan segala bangsa bagi Kristen berarti berupaya mengantarkan orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi. Tanpa harus menolak pemahaman ini, menurut pendapat saya, bisa juga kita memahami “memuridkan” atau “menjadikan murid” sebagai proses yang memungkinkan orang untuk memiliki jiwa-semangat dan keprihatinan Yesus Kristus.

Salah satu perumpamaan tentang Akhir Zaman, yang mengisahkan pemisahan antara domba dan kambing, tidak berkata apa-apa tentang “menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi” sebagai syarat untuk diterima dalam kemuliaan dan kebahagiaan Anak Manusia. Alih-alih, penerimaan didasarkan pada apa yang diperbuat manusia semasa hidupnya terhadap “salah seorang dari saudara-saudara-Ku yang paling hina” (*heni toutôn tôn adelphôn mou tôn elakhistôn*, Matius 25:40). Adapun “saudara-saudara-Ku yang paling hina” adalah kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan oleh struktur-struktur atau Kuasa-kuasa yang tidak adil. Melakukan sesuatu bagi mereka atau salah satu dari mereka berarti mengikuti jiwa-semangat dan keprihatian Yesus, yang “tergerak hati-Nya oleh belas kasihan” (Matius 9:36). Mengikuti jiwa-semangat dan keprihatinan Yesus berarti menjadi murid atau pengikut Gusti Yesus.

Ada murid yang konfesional (mengaku Yesus sebagai Junjungan), ada murid yang non-konfesional (tidak mengaku Yesus sebagai Junjungan). Akan tetapi keduanya menempuh jalan Yesus, yakni jalan kasih-solidaritas, keadilan dan kebenaran, rekonsiliasi serta mengutamakan kaum miskin. Menghubungkannya dengan Gereja menurut *Corpus Paulinum*, umat manusia yang baru, berikut kaum beriman yang tergabung di dalamnya, bekerja untuk memuridkan, yakni menularkan jiwa-semangat dan keprihatinan Kristus kepada semua orang. “Politik pemuridan” ini bisa mengambil bentuk sekolah kader, padepokan/pesantren, kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok basis, atau kelompok obrolan warung atau pos ronda, yang mempertemukan para pengikut Kristus konfesional dengan sesamanya dalam jiwa-semangat dan keprihatinan Kristus.

---

## Penutup

Tiga model berpolitik ini, menurut pendapat saya, memungkinkan Gereja untuk *ikut serta* dalam melakukan konter-hegemoni terhadap “ideologi dominan” dari Kuasa-kuasa, memenangkan perang posisi terhadap Kuasa-kuasa, bahkan membangun blok historis—bersama-sama dengan kelas terhisap dan lapisan-lapisan tertindas lainnya—untuk, sekurang-kurangnya, memperbaiki tatanan masyarakat yang sekian lama terstruktur untuk melanggengkan penghisapan, penindasan, dan peminggiran manusia oleh manusia.

## Daftar Pustaka

---

- Berkhof, Hendrikus. 1962. *Christ and the Powers*. Scottdale: Herald Press.
- Calvin, John. t.t. *Institutes of Christian Religion*. Terj. John Allen. Philadelphia: Presbyterian Board of Christian Education.
- Gramsci, Antonio. 1983. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Schwarzmantel, John. 2015. *Gramsci's Prison Notebooks*. London & New York: Routledge.
- Hegel, G.W.F. 2001. *Philosophy of Right*. Terj. S.W. Dyde. Kitchener: Batoche Books.
- Kelly, Douglas F. 2001. *Munculnya Kemerdekaan di Dunia Modern: Pengaruh Calvin terhadap Lima Pemerintahan dari Abad XVI-Abad XVIII*. Jakarta: Penerbit Momentum.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999a. "Manjing Ajur-Ajer sebagai Garam." Dalam Y.B. Mangunwijaya, *Memuliakan Allah, Mengangkat Sesama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999b. "Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia." Dalam Y.B. Mangunwijaya, *Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marx, Karl. 1975. "Critique of Hegel's Doctrine of State." Dalam Karl Marx, *Early Writings*, Terj. Rodney Livingstone & Gregor Benton. New York: Vintage.
- Marx, Karl. 1998. *The German Ideology*. New York: Prometheus Books.
- Meeter, H. Henry. 1990. *The Basic Ideas of Calvinism*. Grand Rapids: Baker.
- Mendel, Ernest. 1977. *From Class Society to Communism: An Introduction to Marxism*. London: Ink Links.
- Sassoon, Anne Showstake. 2001. "Civil Society." Dalam Tom Bottomore, et. al. (eds.), *A Dictionary of Marxist Thought*. Oxford: Blackwell.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
- Yoder, John H. 2002. *Politics of Jesus*. Grand Rapids/Carlisle: Eerdmans & Paternoster.

---

### Catatan:

<sup>1</sup> Roma 8:38-39: malaikat-malaikat (*anggeloi*), pemerintah-pemerintah (*archai*), dan kuasa-kuasa (*dunamis*); 1 Korintus 2:6-8: penguasa-penguasa dunia ini (*tôn archontôn tou aionôs*); 1 Korintus 15:24-26: segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan (*pasan archên kai pasan exousian kai dunamin*); Galatia 4:3: roh-roh dunia atau pilar-pilar dunia (*ta stoicheia tou kosmou*); Galatia 4:9: roh-roh dunia yang lemah dan miskin (*ta as-*

---

*thenê kai ptôcha stoicheia*); Efesus 1:20-21: segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut (*pasês arches kai exousias kai dunameôs kai kuriotêtos kai pantos onomatos onomazomenou*); Efesus 2:1: jalan dunia ini (*ton aiôna tou kosmou toutou*), penguasa kerajaan angkasa (*ton archonta tês exousias tou aeros*), roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka (*tou pneumatou tou nun energountos en tois huiois tês apetheias*); Efesus 3:10: pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga (*tais archais kai tais exousiais en tois epouraniois*); Efesus 6:12: pemerintah-pemerintah (*tas archas*), penguasa-penguasa (*tas exousias*), kuasa-kuasa dunia yang gelap ini (*tous kosmokratos tou skotous toutou*), dan roh-roh jahat di udara (*ta pneumatika tês penêrias en tois epouraniois*); Kolose 1:16: singgasana (*thronoi*), kerajaan (*kurioêtes*), pemerintah (*archai*), penguasa (*exousiai*); Kolose 2:8: ajaran turun-temurun (*tên paradosis tôn anthrôpôn*) dan roh-roh dunia (*ta stoicheia tou kosmou*); Kolose 2:15: pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa (*tas archas kai tas exousias*); Kolose 2:20: roh-roh dunia (*tôn stoicheiôn tou kosmou*).

<sup>2</sup> Mendel mengemukakan temuan tiga antropolog Inggris, Hobhouse, Wheeler, dan Ginsberg. Setelah mengkaji 425 suku primitif, mereka menyimpulkan bahwa kelas-kelas sosial tidak didapati dalam semua suku yang tidak mengenal pertanian.

